



▶ LAYANAN DP3AP2KB JOGJA

Sigada Padu Petakan Kondisi Keluarga hingga Tingkat RT

Kondisi keluarga di Kota Jogja kini dapat dipetakan hingga tingkat RT melalui Sigada Padu (Sistem Informasi Keluarga Daerah Terpadu). Sistem yang dikembangkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Jogja itu disiapkan untuk membantu pemerintah

menentukan sasaran kebijakan berdasarkan kondisi keluarga di wilayah yang lebih spesifik. Kepala DP3AP2KB Kota Jogja Retnaningtyas mengatakan Sigada Padu dirancang untuk mengubah data keluarga menjadi informasi yang lebih mudah dibaca dan digunakan perangkat daerah. Sistem tersebut terutama diarahkan untuk mendukung program Bangsa Kencana dan

penanganan keluarga berisiko *stunting*.

Retnaningtyas mengatakan kebutuhan terhadap data yang cepat diperbarui dan dapat langsung digunakan menjadi salah satu alasan pengembangan Sigada Padu. Data keluarga yang tersedia dari Pemerintah

Pusat dinilai belum sepenuhnya fleksibel untuk kebutuhan pemerintah daerah, baik dari sisi pemutakhiran maupun pengolahan.

Melalui Sigada Padu, berbagai informasi keluarga ditempatkan dalam satu dasbor. Data tersebut mencakup profil kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga hingga keluarga risiko *stunting*.

Informasi dalam dasbor dapat dipilah berdasarkan wilayah administrasi. Pengguna dapat

melihat kondisi mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, RW hingga RT sehingga pemerintah memiliki gambaran yang lebih spesifik mengenai kondisi keluarga di suatu wilayah.

Pemetaan tersebut membantu perangkat daerah menentukan kelompok yang menjadi sasaran intervensi. Dengan demikian, program tidak hanya disusun berdasarkan data secara umum, tetapi dapat diarahkan sesuai kondisi dan lokasi keluarga yang membutuhkan.

"Jadi data keluarga itu bisa kita lihat sampai wilayah yang lebih kecil. Ini membantu menentukan sasaran program agar intervensinya lebih tepat," kata Retnaningtyas, dikutip Kamis (20/8).

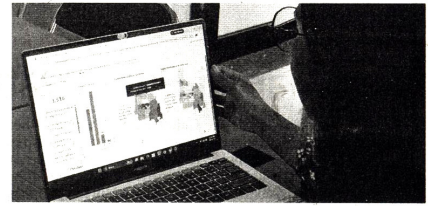
Keberadaan satu dasbor

juga diharapkan mengurangi persoalan data yang tersebar di berbagai sektor. Perangkat daerah dapat menggunakan informasi yang sama sebagai bahan koordinasi dalam menjalankan program kependudukan, pembangunan keluarga maupun penanganan *stunting*.

Sigada Padu dikembangkan melalui sejumlah tahapan. Prosesnya meliputi koordinasi dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, penyiapan basis data dan pembangunan koneksi *host to host*.

Setelah tahapan tersebut, dilakukan uji coba sebelum dasbor diperkenalkan melalui *soft launching*.

Pengembangan sistem tersebut dibiayai melalui



Seorang petugas melihat tampilan dasbor Sistem Informasi Keluarga dan Data Terpadu (Sigada Padu) yang memuat data keluarga dan keluarga berisiko *stunting* di Kota Jogja.

APBD Kota Jogja. Retnaningtyas berharap Sigada Padu tidak berhenti sebagai tempat menampilkan data.

Sistem tersebut diharapkan menjadi rujukan bagi perangkat daerah dalam menyusun, menjalankan hingga mengevaluasi kebijakan

berdasarkan kondisi riil masyarakat. "Harapannya ini menjadi satu sumber informasi keluarga yang bisa dipakai lintas sektor. Jadi kebijakan yang dibuat benar-benar berdasarkan data dan kebutuhan di lapangan," ujarnya.

(Ariq Fajar Hidayat/*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005